

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.W. Wijaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006
- BN Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita Perkembangan Orda, Sejak Zaman Kolonial sampai Saat Ini*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- C.S.T. Kansil, dkk, *Pemerintah Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Hasibuan, Malayu, S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksananya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2019.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2015.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.

- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokarasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gadjahmada University Pers, Yogyakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Pratikno, *Desentralisasi: Pilihan yang Tidak Pernah Final dalam Abdul Gaffar Karim (ed.) Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Pelajar Pustaka, Yogyakarta, 2013

Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soeryono Soekarto, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Sri Hartini, HJ. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Edisi Revisi Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

2. Jurnal

Akhmad Marwi, "Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada

- Pemerintahan Kota Mataram), *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. 3, Desember, (Mataram: Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram), 2016.
- Alfis Ibrahim, “Analisis Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Eselon II : (Studi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol.2 No.2, 2015
- Amelia Cahyadini, dkk, “Mutasi: Bentuk Sanksi Di Bidang Kepegawaian”, *Jurnal VeJ*, Volume 6. Nomor 1. 2020.
- Cholida Hanum,” Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 10 No. 2 Nov 2020.
- Dinoroy Marganda Aritonang, “Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 02, Juni, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN), 2017
- Fitri Rahmadhani Muvariz, “Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.2 - Juni 2019.
- Fitria Ulfah, “Pelaksanaan Mutasi Transfer Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Di Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013.
- Hasan Basri,” Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menentukan Formasi Pengadaan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia”, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017

- Ima Upuwala Were dan Gunawan Bata Ilyas, “Analisis Kebijakan Mutasi Jabatan dan Implikasinya terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Soppeng”, *Jurnal Mirai Management*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Muhajid Edwar, “Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan”, *Mujahid*, [Vol 5, No 2, 2018].
- Muhammad Yassin, “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 2, Mei, 2016.
- Muskamal, “Analisis Kewenangan Atribusi, Delegasi, Mandat, dan Diskreasi dalam Meningkatkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. XII No.2, 2016
- Riana Kasiran, “Analisis Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Administrasi Negara* Volume 27 Nomor 3, Edisi Desember 2021.
- S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum Ius Ouia Iustum*, No.9 Vol.4, 1997.
- Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2013.

Titin kristiana, “Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Badan LITBANG ESDEM Dengan Metode Promethee”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* Vol 5, No 3, 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. Website

Cici Nasya Nita, “Soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi PNS, Ombudsman Sebut Tak Ada Mekanisme Kontrol Mutasi”, dikutip dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol-mutasi>, diakses pada tanggal 27 November 2022.

Ir. Aswin Eka Adhi, “Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai”, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/3945/1/ADPG4447-M1.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

Nur Habibie, “Penjelasan Mendagri Soal Izin Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi Dan Copot ASN”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-mendagri-soal-izin-penjabat-kepala-daerah-boleh-mutasi-dan-copot-asn.html>, diakses pada tanggal 27 November 2022.

Rocket Manajemen, “Pengertian Negara Hukum, Unsur, dan Cirinya”, dikutip dari <http://rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022

Rofiq Hidayat, “Potensi Disalahgunakan, SE Mendagri Nomor 821 Diminta Revisi”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-disalahgunakan--se-mendagri-nomor-821-diminta-revisi-lt632c071791e07?page=3>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

Syarifuddin, “DPR Anggap SE Mendagri No.821 Melawan Undang Undang”, dikutip dari <https://www.wartatransparansi.com/2022/09/22/dpr-anggap-se-mendagri-no-821-melawan-undang-undang.html>, diakses pada tanggal 27 November 2022.

https://www.sayanda.com/otonomidaerah/#Pengertian_Otonomi_Daerah_Menurut_ParaAhli, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

<http://www.berbagaireviews.com/2017/01/pengertian-otonomi-daerah-dasarhukum.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

<http://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, dikutip pada tanggal 10 Februari 2023